

Pemahaman Pegawai Terhadap Sistem Akuntansi Pemerintahan Dalam Kualitas Laporan Keuangan Bagian Organisasi SETDA Sidoarjo

Lathifah Aisha Nurwanti¹,
Fitri Komariyah²

Abstrak

Studi dilakukan agar dapat mengevaluasi secara menyeluruh pemahaman anggota staf mengenai sistem akuntansi pemerintah dan bagaimana hal itu memengaruhi kualitas laporan keuangan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Sepuluh informan keterlibatan dalam proses, baik secara langsung maupun tidak langsung pelaporan keuangan memberikan informasi melalui wawancara mendalam, observasi, dan pencatatan dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman karyawan berbeda-beda tergantung pada pelatihan teknis, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan. Sementara itu, personel non-akuntansi umumnya menyelesaikan pekerjaan secara prosedural tanpa pemahaman yang mendalam, karyawan dengan latar belakang akuntansi biasanya memahami secara lebih mendalam konsep dasar Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sejumlah elemen internal, termasuk efektivitas pengawas, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi staf, dan ketersediaan pelatihan berkelanjutan, memengaruhi akurasi pelaporan keuangan. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia memerlukan strategi yang sistematis, yang mencakup akses terhadap regulasi keuangan, pelatihan teknis, penguatan posisi kepemimpinan, dan penggunaan aplikasi keuangan sebagai medium pendidikan. Penelitian ini menyoroti bahwa mencapai pelaporan keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel yang mematuhi prinsip-prinsip tatakelola yang baik memerlukan pemahaman yang kuat tentang sistem akuntansi pemerintah.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Pemerintahan, Pemahaman Pegawai, Kualitas Laporan Keuangan, Pemerintahan Daerah, Kompetensi SDM.

Abstract

The study was conducted to thoroughly evaluate the staff members' understanding of the government accounting system and how it affects the quality of financial reports in the Organization Section of the Sidoarjo Regency Regional Secretariat. Ten informants involved in the process, whether directly or indirectly in financial reporting, provided information through in-depth interviews, observations, and note-taking using descriptive qualitative methodology. The research findings indicate that employees' understanding varies depending on technical training, work experience, and educational background. Meanwhile, non-accounting personnel generally complete tasks procedurally without a deep understanding, while employees with an accounting background usually have a deeper grasp of the basic concepts of Government Accounting Standards (SAP). Several internal elements, including the effectiveness of supervisors, the use of information technology, staff competence, and the availability of continuous training, affect the accuracy of financial reporting. Enhancing human resource capacity requires a systematic strategy, which includes access to financial regulations, technical training, strengthening leadership positions, and the use of financial applications as an educational medium. This research highlights that achieving accurate, transparent, and accountable financial reporting that adheres to good governance principles requires a strong understanding of the government accounting system.

Keywords: Government Accounting System, Employee Understanding, Quality of Financial Reports, Local Government, Competency of Human Resources.

¹ Prodi Akuntansi, STIE Mahardhika Surabaya, Surabaya, email: lathifahnurwanti@gmail.com

² Prodi Akuntansi, STIE Mahardhika Surabaya, Surabaya, email: fitri.komariyah@stiemahardhika.ac.id

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akuntabilitas dan keterbukaan ialah landasan pelaksanaan tata kelola yang baik. Kedua konsep ini membutuhkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan program, dan proses pelaporan keuangan. Sehingga, laporan keuangan dari PEMDA harus memenuhi kewajiban hukum maupun norma kualitatif termasuk perbandingan, relevansi, dan keandalan.

Pemerintah daerah diberlakukan menyajikan Laporan keuangan *accrual* basis sejak dijalankan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sistem ini mengharuskan pencatatan transaksi didasarkan pada peristiwa ekonomi aktual, bukan merupakan saat penerimaan maupun pembayaran secara kas. Tujuannya adalah agar data keuangan yang disajikan menjadi lebih signifikan dan andal bagi penetapan kebijakan oleh pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Sistem akuntansi pemerintahan berfungsi sebagai teknologi yang mengubah data transaksi menjadi informasi keuangan yang bermanfaat bagi manajemen. Pelaksanaannya sangat bergantung pada pemahaman pegawai terhadap konsep dasar akuntansi pemerintahan. Menurut berbagai studi, termasuk (Gusdian et al., 2024), pemahaman yang baik akan sistem ini berpengaruh sangat menentukan mutu laporan keuangan dihasilkan melalui penyelenggara negara.

Kurangnya pemahaman terhadap sistem akuntansi pemerintahan berdampak pada kesalahan pencatatan pengeluaran, keterlambatan penyusunan laporan, serta penyajian data yang kurang akurat. Penelitian (Batkunde & Dewi, 2022) menyebutkan bahwa standar laporan keuangan yang belum optimal daerah kerap terjadi karena kurangnya kompetensi pegawai dalam akuntansi pemerintahan. Hal ini juga relevan dengan kondisi yang terjadi di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Sidoarjo.

Tantangan lain muncul dari perkembangan teknologi informasi, seperti penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Kurangnya kemampuan teknis pegawai dalam mengoperasikan sistem ini meningkatkan risiko kesalahan dan menghambat efisiensi. Padahal, tuntutan transparansi publik dan pengawasan ketat dari BPK mengharuskan adanya penguasaan sistem yang baik dan menyeluruh.

SAP termasuk seperangkat pedoman dan standar yang dirancang untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan pemerintahan secara sistematis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Indonesia, SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 beserta mengadopsi basis akrual guna mencerminkan kondisi keuangan yang lebih realistis. Metode akrual memungkinkan pelaporan transaksi saat hak dan kewajiban terbentuk, bukanlah hanya sewaktu kas beralih, sehingga menyajikan data yang lebih tepat dan sesuai guna bagi proses pengambilan keputusan publik. Penggunaan sistem ini menuntut kompetensi teknis yang tinggi dari pegawai serta kesiapan lembaga pemerintah untuk mengelola sistem secara konsisten.

Studi (Ramadana et al., 2023) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi sangat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Selain itu, (Apsari Dewi & Agung Ayu Intan Wulandari, 2023) menegaskan perlunya pelatihan dan pembinaan berkelanjutan bagi ASN agar tidak terjadi kesalahan pencatatan dan pelaporan. Hal ini menjadi penting bagi seluruh unit kerja pemerintah, termasuk Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, yang juga terlibat dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan.

Pemahaman pegawai terhadap sistem akuntansi pemerintahan mencakup kemampuan untuk mengenali, memahami, dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi sektor publik sesuai peraturan yang berlaku. Tidak hanya terbatas pada pegawai belatar belakang akuntansi, namun juga menyasar seluruh pegawai di lingkungan pemerintahan yang terlibat dalam proses administratif, perencanaan, maupun pelaporan. Pemahaman yang baik akan meningkatkan akurasi pencatatan transaksi dan mendukung penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Penelitian (Yunitasari et al., 2024) menunjukkan bahwa pegawai yang memiliki pemahaman mendalam terhadap SAP lebih mampu menyesuaikan operasional unit kerjanya dengan prosedur akuntansi berbasis akrual. Sebaliknya, (Handayani et al., 2022) menemukan bahwa kurangnya pemahaman di unit non-keuangan menyebabkan kesalahan pelaporan, keterlambatan, dan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan tanggung jawab keuangan. Oleh karena itu, peningkatan literasi akuntansi tidak hanya penting bagi staf keuangan, tetapi juga bagi semua unsur organisasi, termasuk di bagian administrasi dan perencanaan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merujuk pada indikator berkontribusi bagi menilai performa finansial instansi publik. Kualitas tersebut ditentukan oleh berbagai faktor seperti kepatuhan terhadap SAP, kelengkapan, ketepatan waktu, serta keterbacaan dan transparansi laporan oleh para pemangku kepentingan. Laporan yang berkualitas tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga menggambarkan kondisi ekonomi dan operasional secara objektif. PP No. 71 Tahun 2010 menetapkan sifat bersifat naratif laporan keuangan seperti relevansi, keandalan, dan daya banding sebagai tolok ukur utama.

Pencapaian laporan keuangan berkualitas sangat bergantung pada kemampuan SDM dalam memahami dan mengoperasikan sistem akuntansi dengan benar. Studi (Adelia Putri & Tuti Meutia, 2024) menekankan pentingnya pengawasan internal yang efektif untuk mencegah manipulasi data dan menjamin kepatuhan prosedur. Di unit seperti Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, yang perannya tidak langsung dalam keuangan namun tetap memiliki kewajiban pelaporan, akurasi laporan keuangan menjadi penting untuk menjamin transparansi dalam penggunaan anggaran.

SDM menjadi unsur penting pada keberhasilan pengelolaan keuangan daerah karena keterampilan teknis, pemahaman terhadap regulasi, dan etika kerja sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan akuntabilitas sistem. Pegawai harus memahami cara kerja sistem keuangan berbasis akrual, mampu menafsirkan ketentuan SAP, dan menyusun laporan sesuai ketentuan hukum. (Arza et al., 2021) menyebutkan bahwa karyawan yang berasal dari jurusan akuntansi maupun telah mengikuti *workshop* cenderung lebih siap dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan.

Namun, di instansi seperti Bagian Organisasi, di mana tidak semua pegawai memiliki latar belakang akuntansi, pelatihan teknis dan pendampingan menjadi krusial. (Modjo et al., 2024) menyatakan bahwa kelemahan dalam penguasaan sistem akuntansi, minimnya pelatihan, dan lemahnya etika profesional masih menjadi tantangan umum di pemerintahan daerah. Untuk itu, (Widianto et al., 2024) menegaskan bahwa perencanaan SDM harus mengutamakan kualitas dan kemampuan yang sesuai kebutuhan kerja, bukan sekadar jumlah. Kombinasi antara sistem pengendalian internal dan kebijakan peningkatan SDM, sebagaimana dijelaskan oleh Kejelasan Sasaran (N. Putri & Wahyudi, 2023), menjadi kunci dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.

Penelitian terdahulu berperan penting dalam memberikan dasar konseptual dan empiris bagi suatu penyelidikan ilmiah. Melalui kajian terhadap hasil-hasil studi sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi celah penelitian yang relevan untuk dikaji lebih lanjut, serta memahami arah dan perkembangan studi dalam bidang tertentu. Dalam konteks akuntansi pemerintahan, berbagai penelitian telah menekankan pentingnya sistem akuntansi dan peran pegawai sebagai pelaksana dalam menyusun laporan keuangan dengan standar kualitas unggul, terutama ranah pengelolaan dan penyajian finansial daerah. Misalnya, studi oleh (R. Putri et al., 2023) di Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan bahwa pelatihan teknis yang berkelanjutan dan pemanfaatan sistem informasi keuangan berbasis teknologi memiliki dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan, selama ada keseimbangan antara kapabilitas SDM dan integrasi teknologi.

Studi oleh (Mayanti et al., 2022) menungkapkan meskipun pegawai belum seluruhnya berbekal pengalaman akuntansi, kualitas laporan keuangan tetap dapat dijaga apabila terdapat sistem kerja yang sistematis, pelatihan yang tepat sasaran, dan dukungan manajerial yang kuat. Hal ini relevan dengan kondisi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Sidoarjo yang memiliki SDM dengan latar belakang beragam. Sementara itu, (Rahayu et al., 2022) menekankan pentingnya literasi keuangan, dengan menegaskan adanya pemahaman mengenai konsep dasar akuntansi pemerintah berkorelasi melalui ketepatan waktu juga kebenaran laporan keuangan yang dihasilkan oleh personel di beberapa organisasi pemerintah daerah di Jawa Timur.

Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan publik yang efisien ditopang oleh kombinasi antara keterampilan individu, pelatihan memadai, sistem akuntansi yang dapat diakses, serta pengawasan internal yang kuat. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada perangkat daerah yang menangani fungsi keuangan secara langsung, sedangkan sedikit yang mengkaji bagaimana pemahaman staf non-akuntansi terhadap sistem akuntansi pemerintahan berdampak pada kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, tujuan utama penelitian menutup celah tersebut dengan mengkaji sejauh mana pemahaman pegawai di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo terhadap sistem akuntansi pemerintahan berkontribusi terhadap ketepatan dan akuntabilitas rekapan keuangan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dipilih dalam studi ini guna lebih memahami dengan hal apa anggota staf memandang sistem akuntansi pemerintah dan bagaimana pandangan tersebut mempengaruhi Tingkat akurasi laporan keuangan di Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo. Fokus riset pada makna, persepsi, dan pengalaman subyektif karyawan, bukan pada pengukuran kuantitatif mengarah pada pemilihan metodologi ini. Peneliti dapat menyuguhkan uraian secara menyeluruh juga mendalam tentang realitas maupun sedang dipelajari lewat menggunakan penelitian kualitatif deskriptif untuk menjelaskan fenomena berdasarkan sudut pandang informan dalam konteks yang alami dan holistik.

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Desain dalam penelitian merupakan studi deskriptif beserta metodologi kualitatif. Teknik kualitatif dipilih karena target pada analisis tersebut guna mendapatkan pemahaman mendalam tentang perspektif, pengalaman, dan pemahaman karyawan terhadap sistem akuntansi pemerintah dan bagaimana hal itu sehubungan dengan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Khususnya ketika menganalisis pemahaman individu dalam konteks berbagai tugas dan tanggung jawab, pendekatan ini sejalan dengan sifat eksploratif dan interpretatif dari topik penelitian. Menggali pemahaman secara mendalam tentang topik yang diteliti adalah sasaran dari penelitian ini, bukan menguji teori. Sesuai dengan itu, penekanan utama dari studi ini adalah pada kata-kata, cerita, dan interpretasi daripada data statistik (Jailani et al., 2023)

Lokasi dan Waktu Penelitian

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo menjadi lokasi penelitian ini. Karena peneliti ingin menyelidiki persepsi pekerja di unit kerja yang tidak hanya berkonsentrasi pada tugas keuangan tetapi tetap memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan, lokasi ini dipilih dengan sengaja. Pengumpulan data untuk penelitian berlangsung antara April dan Mei 2025, dengan mempertimbangkan ketersediaan informan dan kelengkapan dokumen yang relevan.

Informan Penelitian

Informan dalam studi ini dipilih dengan sengaja berdasarkan tiga kriteria: (1) mereka harus aktif bekerja di Seksi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; (2) mereka harus terlibat langsung atau tidak langsung dalam proses pelaporan keuangan; dan (3) mereka harus terbuka untuk wawancara mendalam. Pemimpin seksi, pejabat struktural, pekerja operasional, dan karyawan yang ditugaskan untuk mendokumentasikan dan melaporkan informasi keuangan termasuk di antara sepuluh informan tersebut.

Agar peneliti dapat menemukan pola pemahaman, tantangan yang dihadapi, dan taktik yang digunakan dalam memahami dan menerapkan sistem akuntansi pemerintah di tempat kerja mereka, informan dipilih dengan cermat untuk memberikan informasi yang relevan, terperinci, dan bervariasi.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengamatan partisipatif, dokumentasi, dan wawancara mendalam adalah tiga strategi utama yang digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara mendalam dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan kebebasan dalam ekstraksi informasi sambil mengarahkan percakapan menuju kekhawatiran utama Tujuan dari pengamatan adalah untuk memeriksa prosedur pekerjaan secara langsung.

Tinjauan terhadap dokumen internal, termasuk instruksi kerja, laporan keuangan Divisi Organisasi, dan bahan tambahan lainnya yang berkaitan dengan sistem akuntansi pemerintah, termasuk dalam dokumentasi. Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian, triangulasi data dilakukan dengan mengintegrasikan ketiga metode ini.

Pengurangan data, presentasi data, dan kesimpulan (verifikasi) adalah tiga fase utama dari model interaktif yang digunakan dalam analisis data studi ini. Proses pengurangan data melibatkan pemilihan, pengorganisasian, dan penyederhanaan informasi yang relevan dengan topik studi. Presentasi data melibatkan penyusunan matriks tematik dan narasi untuk memungkinkan data yang dikumpulkan diinterpretasikan dengan cara yang terstruktur dan sistematis.

Dari awal pengumpulan data hingga setiap potongan data telah diperiksa, kesimpulan dicapai secara bertahap. Untuk memastikan bahwa hasil yang dihasilkan

secara akurat mencerminkan situasi di lapangan, metode ini bersifat reflektif dan iteratif. Triangulasi sumber, metode, dan waktu digunakan untuk menilai validitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebanyak sepuluh pegawai dari unit Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Sidoarjo dipilih secara purposif sebagai informan dalam penelitian ini. Pemilihan ini didasarkan pada keterlibatan mereka, secara langsung ataupun tidak langsung terkait pengurusan serta penyusunan laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang mencerminkan secara akurat tingkat pemahaman karyawan terhadap sistem akuntansi pemerintahan. Para informan berasal dari berbagai posisi struktural seperti kepala bagian, analis kebijakan, pengelola data, pengelola keuangan, hingga analis tata laksana. Keberagaman peran ini diharapkan dapat memberikan perspektif menyeluruh mengenai penerapan sistem akuntansi pemerintah di unit kerja tersebut.

Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja para informan juga sangat beragam. Sebagian mempunyai pengalaman dalam sektor akuntansi maupun perbendaharaan, yang memungkinkan mereka memahami prosedur pencatatan transaksi berlandaskan prinsip *accrual* sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 71 Tahun 2010 mengenai SAP. Meskipun, sebagian lainnya berasal dari disiplin ilmu non-akuntansi dan lebih mengandalkan pengalaman kerja harian serta arahan dari atasan. Beberapa di antaranya pernah mengikuti pelatihan teknis dari lembaga seperti Inspektorat atau BPKAD, yang secara signifikan meningkatkan pemahaman mereka terhadap sistem akuntansi pemerintah.

Penerapan aplikasi sistem informasi keuangan seperti SIPKD dan SIMDA telah mempercepat proses administrasi keuangan. Namun, pemahaman pegawai terhadap prinsip akuntansi yang mendasari penggunaan aplikasi tersebut masih terbatas, terutama di kalangan yang tidak memiliki latar belakang akuntansi. Banyak pegawai hanya menjalankan prosedur secara mekanis tanpa mengetahui logika akuntansi di baliknya. Ketergantungan terhadap staf senior dalam menjalankan tugas menunjukkan perlunya pelatihan berkelanjutan untuk membangun kompetensi teknis yang merata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap sistem akuntansi pemerintahan di antara pegawai masih bervariasi dan belum sepenuhnya konsisten, dipengaruhi oleh jabatan, pendidikan, pengalaman, dan pelatihan yang diterima.

Pemahaman Pegawai terhadap Sistem Akuntansi Pemerintahan

Pemahaman karyawan tentang sistem akuntansi pemerintah sangat bervariasi, dipengaruhi oleh pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, dan keterlibatan langsung dalam proses pelaporan keuangan. Wawancara dengan sepuluh informan mengungkapkan bahwa staf dengan gelar akuntansi dan pengalaman manajemen keuangan lebih memahami konsep inti penerapan sistem pencatatan akrual yang mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Meskipun pemahaman konseptual tentang prinsip akuntansi sudah cukup umum, pemahaman teknis dan penerapan praktik masih perlu diperkuat. Hal ini juga terlihat dari penggunaan sistem informasi keuangan seperti SIPKD dan SIMDA, di mana banyak pegawai hanya menjalankan tugas secara prosedural tanpa memahami tujuan dan konsekuensi dari langkah-langkah tersebut, yang berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan ketidaksesuaian laporan. Selain itu, sebagian pegawai hanya mengandalkan kebiasaan dan prosedur yang diwariskan tanpa pemahaman regulasi yang

mendalam, sementara pegawai yang mengikuti pelatihan teknis menunjukkan pemahaman yang lebih sistematis dan menyeluruh.

Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman pegawai terhadap prosedur pencatatan dan pelaporan sesuai standar akuntansi pemerintah. Penguasaan sistem akuntansi berbasis akrual dan prinsip pendukungnya memungkinkan pegawai melakukan pencatatan transaksi secara tepat, konsisten, dan lengkap, sedangkan kurangnya pemahaman kerap menghasilkan pencatatan administratif yang tidak sesuai standar dan berdampak negatif pada kualitas laporan. Penggunaan sistem informasi keuangan seperti SIPKD dan SIMDA juga menjadi faktor penting dalam mempercepat dan meningkatkan akuntabilitas pelaporan, namun masih ditemukan praktik input data secara mekanis tanpa pemahaman yang cukup, sehingga rawan kesalahan. Selain itu, saran teknis dan pengawasan dari pejabat struktural sangat diperlukan untuk memastikan laporan keuangan disusun sesuai aturan dan prosedur, sekaligus membantu mendeteksi kesalahan secara dini, terutama bagi pegawai yang belum menguasai logika akuntansi pemerintahan secara penuh.

Selain faktor individu dan teknologi, kerja sama dan komunikasi antar pegawai juga menentukan efisiensi dan ketepatan pelaporan keuangan. Unit dengan sumber daya terbatas seperti Seksi Organisasi yang hanya memiliki sepuluh personel sangat bergantung pada pembagian kerja yang jelas, komunikasi terbuka, dan koordinasi yang baik agar tumpang tindih dan kelalaian dapat diminimalkan. Pelatihan teknis secara rutin juga menjadi elemen kunci dalam meningkatkan kompetensi pegawai agar dapat menyesuaikan prosedur kerja dengan kebijakan dan regulasi terbaru. Tanpa pelatihan yang memadai, kualitas laporan cenderung stagnan dan sulit memenuhi kriteria audit yang ditetapkan oleh BPK RI. Dengan demikian, pengembangan kapasitas pegawai melalui pelatihan dan bimbingan yang kontinu sangat penting demi mencapai laporan keuangan dengan berkualitas, dapat dipertanggungjawabkan.

Strategi Peningkatan Pemahaman Pegawai terhadap Sistem Akuntansi Pemerintahan

Pengetahuan karyawan mengenai sistem akuntansi pemerintahan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo masih menunjukkan ketidakkonsistenan, yang sebagian besar disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta ketergantungan pada arahan dari atasan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi peningkatan pengetahuan yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan untuk memastikan mutu laporan keuangan yang disajikan memenuhi standar serta peraturan yang relevan. Strategi tersebut harus mencakup peningkatan kualitas kepemimpinan, optimalisasi sistem informasi keuangan yang digunakan, serta penyelenggaraan pelatihan teknis secara teratur sebagai bagian integral dari pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Pelatihan teknis yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi elemen penting dalam mendukung pemahaman pegawai terhadap sistem akuntansi pemerintahan. Pemerintah daerah dapat menyusun program pelatihan yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan tugas masing-masing pegawai, bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan unit manajemen keuangan. Materi pelatihan harus mencakup pemahaman teoretis mengenai sistem akuntansi pemerintahan serta simulasi penyusunan laporan keuangan berbasis aplikasi seperti SIPKD atau SIMDA. Dengan demikian, pelatihan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan konseptual, tetapi juga keterampilan

praktis, terutama bagi pegawai tidak mempunyai riwayat pembelajaran dalam ranah akuntansi maupun keuangan.

Selain pembinaan, peran pemimpin unit kerja sangat penting dalam memberikan pembinaan, arahan, dan pengawasan yang efektif. Pemimpin harus mampu berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang mampu mengaitkan prinsip-prinsip akuntansi dengan pelaksanaan tugas sehari-hari. Optimalisasi penggunaan sistem informasi keuangan juga harus diarahkan tidak hanya untuk keperluan input data, tetapi sebagai media pembelajaran melalui penyediaan modul internal, panduan penggunaan, dan diskusi teknis berkala. Akses terhadap regulasi seperti PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dan peraturan lainnya juga perlu difasilitasi untuk mendukung pembelajaran mandiri. Dengan menerapkan strategi ini secara simultan dan terkoordinasi, diharapkan pemahaman pegawai terhadap sistem akuntansi pemerintahan akan meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya berkontribusi dalam hal perancangan catatan pendanaan lebih bersifat akuntabel, terbuka, juga berkualitas.

SIMPULAN

Temuan studi menunjukkan bahwa anggota staf di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Sidoarjo memiliki pemahaman yang tidak merata tentang sistem akuntansi pemerintahan, yang masih perlu ditingkatkan. Beberapa staf, terutama yang memiliki gelar atau keahlian di bidang keuangan, sudah cukup mahir dalam memahami dan menerapkan aturan dan regulasi akuntansi pemerintahan. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan terjadi karena personel yang tidak sepenuhnya memahami sistem akuntansi pemerintahan. Dalam praktiknya, persiapan laporan keuangan masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan dalam kemampuan teknis, kurangnya pelatihan praktis, dan dukungan yang terbatas dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Meskipun demikian, beberapa langkah telah diambil oleh agen-agen, seperti pelatihan teknis dan pendampingan oleh pimpinan, dengan maksud untuk memperdalam pemahaman serta meningkatkan keterampilan karyawan. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan demi mewujudkan laporan keuangan yang akurat, tidak tertutup, dan sesuai prinsip pertanggungjawaban, dibutuhkan lebih banyak upaya yang terstruktur dan berkelanjutan dalam pengembangan kompetensi karyawan, khususnya dalam memahami sistem akuntansi pemerintah.

REFERENSI

- Amin, S. R. D., & Pamungkas, H. P. (2022). Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM Sub Sektor Usaha Mikro di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 10(3), 377–385. <https://doi.org/10.31846/jae.v10i3.480>
- Ardiansyah, A., Risnita, R., & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Arza, O., Yulia, S., & Nancy, D. M. (2021). The Effect of Human Resources, Application of Government Accounting Standards and Accounting Information Systems on the Quality of Financial Reports in the Government of the City of Padang Panjang. *Pareso Jurnal*, 3(3), 519–542. <https://ejournal-unespadang.ac.id/index.php/PJ/article/view/364>

- Batkunde, A. A., & Dewi, P. M. (2022). Pengaruh Moralitas Individu dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Pemerintah Kota Ambon. *Owner*, 6(3), 1687–1697. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.917>
- Binawati, E., & Nindyaningsih, C. T. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Dinas-Dinas SKPD di Kabupaten Klat. *Optimal (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Aktual STIE IEU Yogyakarta)*, 19(1), 1–14. <https://jurnal.stieieu.ac.id/index.php/opt/article/view/213>
- Budiarti, R. P. N., Primasari, N. S., Zuhdi, U., Meutia, N. S., Rokhim, F., Irbah, H. L., & Brilliant, A. A. (2023). Implementasi dan Sosialisasi Sistem Informasi Kasir Online untuk UMKM di Kelurahan Banyu Urip Kota Surabaya. *Indonesia Berdaya*, 5(1), 41–48. <https://doi.org/10.47679/ib.2024650>
- Dewi, G. A., & Wulandari, A. A. A. I. (2023). Tantangan dan Harapan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Wilayah Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 8(2), 106–111. <https://doi.org/10.38043/jiab.v8i2.4619>
- Gusdian, S., Wahyudi, T., & Yusrianti, H. (2024). Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi, Keahlian Pemakai, dan Intensitas Pemakaian terhadap Kualitas Informasi Akuntansi dengan Budaya Organisasi sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 6(1), 80–90. <https://doi.org/10.37034/infeb.v6i1.804>
- Handayani, F., Sari, D. M., & Yuniarti, A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 9–20. <https://doi.org/10.32639/jiak.v11i1.14>
- Modjo, S. R., Pakudu, R., & Idji, R. A. (2024). Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Operator PDDIKTI di LLDIKTI Wilayah XVI. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN:*, 4(3), 2805–2822. <https://doi.org/https://doi.org/10.53363/bureau.v4i3.462>
- Putri, A., & Meutia, T. (2024). Literature Review: Pengaruh Audit Manajemen, Sistem Pengendalian Internal, Peran Audit Internal, terhadap Good Corporate Governance Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 236–249. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i2.1785>
- Putri, N., Afrizal, A., & Wahyudi, I. (2023). The Effect of Budget Clarity, Human Resources Capacity and Information Technology Utilization on Regional Financial Management with the Internal Control System as an Intervening Variabl. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*, 8(3), 224–240. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jaku.v8i3.36369>
- Ramadana, S. W., Mariana, M., Rahmaniar, R., & Bahgia, S. (2023). Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Owner*, 7(2), 1831–1840. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590>
- Widianto, A. W., Kuntadi, C., & Karunia, R. L. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Anggaran: Standar Operasional Prosedur (SOP), Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pimpinan. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Logistik*, 2(3), 2–15.
- Yunitasari, F. A., Setyowati, L., Durya, N. P. M. A., & Pamungkas, I. D. (2024). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi

Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 10(1), 58–71. <https://doi.org/10.38204/jrak.v10i1.1715>